

EKONOMI DAN PELAYANAN PUBLIK

Rabu, 15 Juli 2026 - Nurul Istiamuji

"Keputusan ekonomi yang bijak adalah hasil dari pemahaman yang mendalam tentang risiko dan manfaat." Adam Smith

Kutipan dari tokoh ekonomi dunia tersebut menegaskan bahwa ekonomi merupakan hukum timbal balik atas ketersediaan barang dan jasa. Berbicara tentang ekonomi tentu tidak hanya seputar angka dan data. Ekonomi memerlukan pemahaman yang luas karena memiliki dampak pengganda (multiplier effect) terhadap berbagai sendi kehidupan, tanpa mengesampingkan bidang lainnya.

Secara keilmuan, masyarakat umumnya mengetahui bahwa kata "ekonomi" berasal dari bahasa Yunani: Oikos (rumah tangga) dan Nomos (aturan/pengelolaan). Secara definisi, ekonomi adalah cabang ilmu yang mempelajari cara mengelola sumber daya yang terbatas untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia yang tidak terbatas.

Dalam implementasinya, ekonomi dapat disederhanakan sebagai pilihan (choice) dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai contoh, keputusan untuk berangkat kuliah atau kerja menggunakan kendaraan pribadi atau transportasi umum adalah sebuah pilihan ekonomi yang memengaruhi efisiensi waktu dan biaya.

Dalam skala kebijakan pemerintah, pilihan ini tercermin pada alokasi anggaran: apakah dana daerah dihabiskan untuk rapat internal dan pengadaan barang/jasa yang belum tepat sasaran, atau dialokasikan pada program pemberdayaan UMKM demi meningkatkan ekonomi kerakyatan serta program inklusif lainnya.

Roda perekonomian tidak terlepas dari kebijakan makro dan mikro. Kebijakan makro berkaitan dengan pengambilan keputusan ekonomi secara menyeluruh atau skala agregat. Kebijakan ini terbagi menjadi dua yakni kebijakan fiskal yang merupakan domain pemerintah yang mengatur penerimaan dan pengeluaran negara, contohnya melalui penetapan tarif pajak dan anggaran infrastruktur. Kedua, kebijakan moneter yakni kebijakan bank sentral (Bank Indonesia) untuk mengatur jumlah uang beredar dan tingkat suku bunga acuan.

Sementara itu, ekonomi mikro berfokus pada aktivitas produsen dan konsumen dalam menentukan kuantitas, harga, dan alokasi sumber daya produksi, yang ditinjau melalui teori harga, teori produksi, dan teori pasar.

Saat ini, kebijakan fiskal makro pemerintah Indonesia diimplementasikan melalui pembangunan infrastruktur untuk percepatan konektivitas nasional, serta program kesejahteraan sosial di bidang perlindungan sosial, pendidikan, dan kesehatan. Di sisi moneter, Bank Indonesia fokus mengendalikan inflasi dan menjaga stabilitas nilai mata uang.

Di tingkat mikro, kebijakan pemerintah diwujudkan melalui pemberian subsidi kredit dan permodalan, kemudahan perizinan, digitalisasi pemasaran produk UMKM, serta pelatihan dan sertifikasi bagi pelaku usaha.

Kebijakan Ekonomi dan Pelayanan Publik

Kebijakan ekonomi pemerintah berimplikasi signifikan terhadap pelayanan publik, baik secara positif maupun negatif, tergantung pada arah politik anggaran yang diambil. Pelayanan publik selalu menjadi topik hangat, mulai dari ruang formal hingga obrolan di warung kopi. Semua pihak mendambakan good governance demi pelayanan publik yang ideal.

Namun, apakah pelayanan publik sudah menjadi indikator utama keberhasilan suatu daerah? Hal ini dapat dilihat dari arah kebijakan, politik anggaran, dan fokus para pengambil keputusan.

Dalam menyusun kebijakan, penting untuk melihat apakah keputusan ekonomi telah memprioritaskan perbaikan pelayanan publik. Sebagai contoh, apakah program pemberdayaan masyarakat yang berdampak langsung sudah mendapatkan porsi anggaran yang lebih besar daripada agenda rapat internal pemerintah yang minim output dan outcome bagi masyarakat?

Pelayanan publik adalah jembatan pemenuhan hak dan kewajiban antara penyelenggara pelayanan dan masyarakat. Di sinilah ekonomi berperan sebagai sebuah "pilihan" (choice). Pilihan yang diambil oleh pemangku kebijakan mencerminkan seberapa besar kepedulian mereka terhadap isu pelayanan publik.

Pelayanan Publik Kalimantan Timur

Berdasarkan data Ombudsman RI Perwakilan Kalimantan Timur tahun 2025, tercatat 518 akses pengaduan masyarakat. Dari jumlah tersebut, 236 ditindaklanjuti sebagai Laporan Masyarakat dan 10 melalui Respon Cepat Ombudsman. Tidak semua akses menjadi laporan karena sebagian belum memenuhi syarat formil dan materiil. Meski demikian, tingginya angka pengaduan ini menjadi indikator penting untuk mengevaluasi apakah pelayanan publik di Kalimantan Timur sudah berjalan dengan baik. Kita tidak bisa menilainya tanpa melihat akar permasalahan secara komprehensif.

Hubungan antara pelayanan publik dan ekonomi merupakan diskursus yang menarik, khususnya mengenai bagaimana arah politik anggaran berdampak pada perbaikan layanan. Salah satu solusi menyikapi tingginya aduan di Kaltim adalah mengintervensi anggaran untuk peningkatan kompetensi aparatur, terutama dalam merespons pengaduan di organisasi perangkat daerah (OPD).

Di bidang pengadaan barang dan jasa, alokasi anggaran sebaiknya dialihkan untuk meningkatkan aksesibilitas bagi kelompok rentan dan marginal di ruang pelayanan publik, daripada memprioritaskan pengadaan yang tidak menyentuh langsung kebutuhan masyarakat.

Penguatan ekonomi dalam pelayanan publik juga dapat dilakukan dengan mengintervensi infrastruktur konektivitas antardaerah, memberikan stimulus perlindungan sosial bagi kelompok rentan, serta memperkuat UMKM. Selain itu, pemerintah perlu membuka ruang pemasaran bagi petani dan nelayan, mendorong hilirisasi produk, dan memperkuat pemberdayaan ekonomi melalui teknologi pra dan pasca-produksi.

Hubungan antara ekonomi dan pelayanan publik mungkin tidak selalu terlihat langsung. Namun jika dicermati, memahami ekonomi bukan sekadar melihat angka dan data, melainkan menganalisis bagaimana kebijakan politik anggaran menentukan arah pembangunan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik demi kesejahteraan masyarakat.

Sebagai penutup, Karl Marx pernah menyatakan: "Akumulasi kekayaan di satu kutub adalah akumulasi kemiskinan, penderitaan, perbudakan, kebodohan, dan degradasi mental di kutub lainnya."